

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Kemudian menurut pendapat Mubyarto (1997:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Menurut Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual.

Berdasarkan definisi partisipasi yang diungkapkan oleh para pakar tersebut di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. Pembangunan dapat berjalan terus menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda apabila pembangunan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan harus dilaksanakan sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri.

Partisipasi mengandung makna keterlibatan untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan

pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat.

Menurut Oos. M. Anwas (2014:92) Salah satu indikator dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja dan bukan juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis.

2.1.1 Bentuk Partisipasi

Menurut Derick (dalam Bryant dan White, 1987:280), nilai partisipasi tidak hanya terletak pada ada tidaknya partisipasi itu, hal yang terpenting adalah menentukan bentuk partisipasi yang tepat untuk persoalan tertentu. Dalam hal ini ditekankan pentingnya mengenali bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988:16) dikemukakan bahwa Bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa; a) pikiran, b) tenaga, d) keahlian, e) barang dan f) uang. Bentuk partisipasi masyarakat ini dilakukan dalam berbagai cara, yaitu;

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa;
- b. Sumbangan spontanitas berupa uang dan barang;
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri;
- d. Sumbangan dalam bentuk kerja;
- e. Aksi massa;
- f. Mengadakan pembangunan di dalam keluarga dan

g. Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

2.1.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Untuk mengukur skala partisipasi masyarakat dapat diketahui dari kriteria penilaian tingkat partisipasi untuk setiap individu (anggota kelompok) yang diberikan oleh Chapin (dalam Slamet, 1994: 83) sebagai berikut:

1. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut;
2. Frekuensi kehadiran (attendance) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan;
3. Sumbangan/iuran yang diberikan;
4. Keanggotaan dalam kepengurusan;
5. Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan;
6. Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan.

Menurut Nabeel Hamdi dan Reinhard Goethert (1997:66), sebagai bantuan untuk menguji alat dan teknik, tahapan dan program dihubungkan dalam matriks pada

ketelitian tingkat partisipasi. Tingkatan partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak Ada (*none*): outsider adalah semata-mata bertanggung jawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat;
2. Tidak langsung (*indirect*): adalah sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik. Ada dua faktor yang dibutuhkan untuk keberhasilan partisipasi tidak langsung ini, yaitu : ketersediaan data yang dapat dipercaya dan memadai serta keahlian dalam mengumpulkan dan mengolah data;
3. Konsultatif (*consultative*): para outsider mendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat. Peran mereka secara prinsip untuk menghimpun informasi dan menentukan tindakan yang sesuai menurut mereka. Disini ada beberapa bentuk konsultasi, dari informasi yang dihimpun sampai pengambilan keputusan, dari konsultasi kelompok besar sampai survei individu dan wawancara. Pada tingkatan ini masyarakat berperan sebagai kelompok kepentingan tetapi sedikit dipertimbangkan sebagai stakeholders;
4. Terbagi (*shared*): pada tahapan ini masyarakat dan outsider berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan. Pengambilan keputusan terbagi memerlukan kelompok yang relatif kecil untuk mencapai hasil yang efektif. Pembahasanpembahasan perlu untuk memasukkan kelompok-kelompok inti dari para pelaku (*stakeholders*) yang mewakili bermacam-macam kepentingan tetap didalam masyarakat;
5. Pengendalian penuh (*full control*): masyarakat mendominasi dan outsider sebagai praktisi adalah sumber daya (*resource*). Para outsider yang melakukan pengamatan atau memberikan sesuatu secara teknis membantu ketika diperlukan. Secara kepemilikan, hal ini terbagi partisipasinya, tapi lebih utuh pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan adalah salah satu tujuan dari partisipasi masyarakat, dan tingkat ini mewakili impian dan praktik.

Pelibatan atau partisipasi masyarakat menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:59), hendaknya dilakukan dalam setiap proses/tahapan pembangunan, yaitu;

dalam tahap identifikasi permasalahan, proses perencanaan, pelaksanaan proyek pembangunan, evaluasi, mitigasi dan dalam tahap monitoring.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat dalam Program PAMSIMAS

Menurut Conyers (1991), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sangat penting, pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal; kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam program Pamsimas. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat diukur berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan indikator yang digunakan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Berikut indikator partisipasi dalam Program PAMSIMAS:

Tabel II. 1 Indikator Partisipasi dalam Program PAMSIMAS

Tahap	Indikator
Perencanaan	Mengikuti Rapat
	Menyumbang Ide
	Menentukan Lokasi
	Memberi masukan
Pelaksanaan	Memberi usul dalam tata cara pelaksanaan
	Terlibat Penggalian saluran pipa
	Terlibat penampungan air
	Terlibat menyumbang material
Pemanfaatan Hasil	Kontribusi tenaga dalam pengaturan
	Kontribusi berupa uang dalam pemeliharaan
	Kontribusi tenaga dalam pemeliharaan

Sumber :Djaya Mulya, Maulel Moelyono dan Wildani Pinkan S Hamzens (2019)

2.2 Program PAMSIMAS

Menurut Petunjuk teknis PAMSIMAS (2015), Program PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Program PAMSIMAS merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas, 2015). Program PAMSIMAS merupakan program pembangunan infrastruktur pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan dan peri-urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Secara lebih rinci PAMSIMAS bertujuan untuk :

1. Meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Menurut Maharani, 2014 kriteria desa sasaran Program PAMSIMAS adalah :

1. Indeks Kemiskinan Desa yang tinggi
2. Desa yang terbatas akses terhadap air minum dan sanitasi
3. Desa dengan prevalensi penyakit diare/terkait air yang tinggi
4. Desa yang belum pernah mendapatkan Program PAMSIMAS

Adapun Konsep keberlanjutan yang dipakai dalam Program Pamsimas menurut (Petunjuk Teknik PAMSIMAS, 2015) adalah:

1. Keberlanjutan teknis, mencakup kepada berfungsinya secara benar dan dapat diandalkan terhadap teknologi serta pelayanan sistem air minum dan dapat

- memberikan pelayanan dengan jumlah air yang memadai secara kontinu dengan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan;
2. Keberlanjutan pendanaan, sistem hanya dapat berfungsi bila sumber pendanaan/finansial paling tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional, pemeliharaan dan perbaikan;
 3. Keberlanjutan kelembagaan, apakah dalam proses pembentukan badan pengelola telah memperhatikan kesetaraan gender dan pelibatan kelompok miskin, serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan transparansi, kelembagaan yang ada harus mempunyai karakteristik lokal, aturan dan akuntabilitas;
 4. Keberlanjutan sosial, pemanfaat akan mendukung keberlanjutan sistem bila harapan mereka dapat terpenuhi, ini berarti bahwa pelayanan yang ada harus mudah mereka akses, yang mana pemanfaat diberikan pilihan untuk teknologi pelayanan sesuai dengan kemampuan pembiayaan, budaya dan tata cara keseharian;
 5. Keberlanjutan lingkungan, sumber air akan menghadapi banyak ancaman, seperti terlalu besarnya penyadapan, kontaminasi, penggundulan hutan, dan fasilitas/sarana air minum dan sanitasi sendiri juga akan menjadikan ancaman terhadap lingkungan.

Program PAMSIMAS telah berjalan selama hamper 10 tahun dan terbagi dalam tiga tahap. Program PAMSIMAS I berlangsung selama kurun waktu empat tahun yaitu pada tahun 2008- 2012. Program PAMSIMAS II berlangsung selama kurun waktu 2 tahun yaitu pada tahun 2013-2015 dan telah berhasil meningkatkan jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan dan pinggiran kota agar dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, adanya Program PAMSIMAS ini diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi di 12.000 desa yang tersebar di 233 Kabupaten/Kota (www.pamsimas.org). Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi Program PAMSIMAS III dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dengan melanjutkan visi dan misi meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan di wilayah kabupaten.

2.2.1 Indikator PHBS dalam Program PAMSIMAS

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat mengenai dan mengatasi masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya (Dinkes Lampung, 2003). PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar/ menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalan komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (*advokasi*), bina suasana (*social support*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Sehingga, dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat (Dinkes, 2006).

Program PAMSIMAS, sebagaimana tercakup dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), ada 4 pilar ber-PHBS, yaitu:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Perilaku buang air besar sembarangan jelas sangat merugikan kondisi kesehatan masyarakat, karena tinja dikenal sebagai media tempat hidupnya bakteri coli yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit diare. Kebiasaan buruk menyebabkan penyakit, sehingga perlu adanya PHBS dengan membuang tinja ke jamban.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Dari aspek kesehatan masyarakat, khususnya pola penyebaran penyakit menular, cukup banyak penyakit yang dapat dicegah melalui kebiasaan atau perilaku higienes dengan cuci tangan pakai sabun (CTPS).
3. Mengamankan air minum rumah tangga dan penggunaan air bersih air di alam akan digunakan sebagai sumber air baku air minum bagi masyarakat. Air yang tercemar akan menyebabkan susah dalam pengolahannya, memerlukan teknologi yang kadang-kadang canggih. Untuk itu air di alam harus dipelihara, dan dicegah dari pencemaran.
4. Pengelolaan sampah rumah tangga, sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari bahan yang bisa membusuk (organik) dan tidak membusuk (anorganik) yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat.

2.2.2 Indikator Keberhasilan Program PAMSIMAS

Program PAMSIMAS menjadi salah satu wujud nyata pembangunan infrastruktur yang melibatkan peran masyarakat. Adanya Program PAMSIMAS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa yang berdampak pada meningkatkannya kesejahteraan desa itu sendiri. Dalam mencapai keberhasilan Program pamsimas diperlukan sasaran dan tujuan yang jelas dan realistis. Adanya tujuan program pamsimas sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program PAMSIMAS itu sendiri.

Menurut Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat tahun 2015, sasaran Program PAMSIMAS adalah sebagai berikut :

1. Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman dan berkelanjutan;
2. Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
3. Minimal 50 persen masyarakat dusun (lokasi Program) menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
4. Minimal 60 persen masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
5. Pemerintah kabupaten/kotamemiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarus utamaan Pendekatan PAMSIMAS dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah;
6. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta perluasan program air minum dan sanitasi untuk mencapai target Universal Access 2019.

Berdasarkan sasaran yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa secara umum tujuan dari adanya Program PAMSIMAS yaitu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi khususnya masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah. Program PAMSIMAS adalah program yang didirikan dengan prinsip dari masyarakat untuk masyarakat. Dengan diwujudkan sasaran

program pamsimas makan tujuan dari pelaksanaan Program Pamsimas tersebut akan tercapai.

Menurut Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS 2015, Indikator pelaksanaan program PAMSIMAS di tingkat masyarakat dinilai berhasil jika memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tujuan Umum Program
 - a. Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap fasilitas air minum yang layak sebesar 50-100 persen dari masyarakat yang belum memiliki akses;
 - b. Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap fasilitas sanitasi yang layak sebesar 100 persen paling lambat pada tahun ketiga setelah pemecuan.
2. Komponen 1 terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal.
3. Komponen 2 Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi
 - a. 100 persen kelompok masyarakat sasaran berhenti buang air besar sembarangan;
 - b. 80 persen kelompok masyarakat sasaran menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu kritis;
 - c. 95 persen sekolah sasaran mempunyai sarana sanitasi yang layak dan program PHBS.
4. Komponen 3 Penyediaan Sarana Air Minum atau Sanitasi Umum
 - a. Sarana air minum yang berfungsi, dimanfaatkan serta memenuhi tingkat kepuasan mayoritas masyarakat sasaran di perdesaan;
 - b. Sarana air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat di perdesaan

2.2.3 Pengelola Program PAMSIMAS

A. Tingkat Pusat

Menurut Pedoman Umum PAMSIMAS 2016 disebutkan bahwa Program PAMSIMAS dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui penyediaan bantuan secara langsung ke tingkat desa, namun dengan mekanisme yang membutuhkan

keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Program PASMISMAS berada dibawah Departemen Pekerjaan Umum, dengan didukung lembaga pelaksana program lainnya, yakni Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional.

Selain itu ditingkat Pusat di Bentuk Central Project Management Unit (CPMU) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PUPR, berkedudukan di Ditjen Cipta Karya dan terdiri dari perwakilan instansi terkait dengan Program Pamsimas. Ketua CPMU dibantu oleh Wakil Ketua CPMU, Koordinator Bidang, dan Asisten. Ketua dan anggota CPMU bertanggungjawab kepada Executing Agency mengenai pengelolaan dan administrasi Program PAMSIMAS secara keseluruhan.

B. Tingkat Provinsi

Kelembagaan di tingkat Provinsi terdapat Tim Koordinasi Provinsi (TKP) dengan diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi, dan beranggotakan Dinas Bidang Cipta Karya Provinsi, Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Di provinsi dibentuk *Provincial Project Management Unit* (PPMU) yang akan diketuai oleh staf Dinas Pekerjaan Umum atau yang sejenis dan beranggotakan perwakilan dari berbagai departemen/dinas teknis terkait (kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat) di levelnya masing-masing. *Provincial Project Management* (PPMU) memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menjalankan kontrak konsultan yang ditunjuk dalam PAMSIMAS. Peran PPMU antara lain untuk mengelola dan memonitor program secara efektif serta menjamin kualitas seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan, proses persetujuan dan pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota Di setiap Kabupaten/Kota terdapat Tim koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) dengan diketuai oleh Kepala Bappeda provinsi setempat, dan beranggotakan Dinas Bidang Cipta Karya provinsi, Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat provinsi, Dinas Kesehatan provinsi, dan instansi terkait pemberdayaan masyarakat serta perwakilan kelompok

peduli/masyarakat sipil/LSM lokal. Tim Koordinasi yang ada dengan fungsi yang sejenis dapat diberlakukan sebagai Tim Koordinasi Program PAMSIMAS. Dinas Pekerjaan Umum, atau sejenisnya, memiliki fungsi pelaksana di tingkat kabupaten/kota. Di setiap kabupaten/kota dibentuk *District Project Management Unit* (DPMU). Peran DPMU antara lain untuk mengelola dan memonitor program secara efektif serta menjamin kualitas seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan, proses persetujuan dan pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). .

D. Tingkat Desa

Kelembagaan masyarakat dan unit pelaksana struktur organisasi program di tingkat desa/kelurahan berbeda signifikan dengan struktur formal di tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan SPAMS di tingkat desa. BPSPAMS berperan dalam program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan serta dukungan keberlanjutan kegiatan program.

2.2.4 Pendanaan Program PAMSIMAS

Menurut Pedoman Umum PAMSIMAS 2016 disebutkan bahwa pengelolaan Program PAMSIMAS disebutkan bahwa pembiayaan program PAMSIMAS melalui sumber dana pinjaman luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia dan DFAT, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, serta dana kontribusi masyarakat.

A. Dana PHLN Bank Dunia dan DFAT

Alokasi dana ini pada dasarnya terbagi atas 2 bagian yaitu:

1. Alokasi BLM Desa, bantuan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan Komponen 3 untuk peningkatan sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang dituangkan dalam RKM di Desa APBN dengan kontribusi APBN sebesar 70 persen, APBDes 10 persen dan kontribusi masyarakat sebesar 20 persen; BLM Desa bersumberkan dana PHLN membiayai secara terbatas;

2. Alokasi Non-BLM, bantuan dana di luar BLM untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dana ini meliputi pengadaan barang, pengadaan fasilitator dan bantuan teknis, lokakarya dan pelatihan.

B. APBN

Dana yang berasal dari Pemerintah antara lain digunakan untuk sebagian kegiatan yang berkaitan dengan:

1. BLM APBN untuk Desa Baru (Komponen 3) sebesar minimal 70 persen dari total RKM Desa APBN dengan kontribusi APBDes sebesar 10 persen dan masyarakat sebesar 20 persen;
2. BLM APBN untuk Desa Pamsimas dengan opsi perbaikan kinerja dan pengembangan (Komponen 4) sebesar minimal 35 persen dari total pagu BLM dengan kontribusi dari APBD minimal sebesar 35 persen, kontribusi APBDes sebesar 10 persen dan kontribusi masyarakat sebesar 20 persen;

C. APBD Kabupaten

Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dianggarkan tiap tahunnya untuk kegiatan program antara lain:

1. BLM APBD untuk Desa Baru (Komponen 3) sebesar minimal 70 persen dari total pagu RKM Desa APBD dengan kontribusi APBDes sebesar 10 persen dan masyarakat sebesar 20 persen;
2. BLM APBD untuk Desa Pamsimas dengan opsi perbaikan kinerja dan pengembangan (Komponen 4) sebesar minimal 35 persen dari total pagu BLM dengan kontribusi dari APBN minimal sebesar 35 persen, kontribusi APBDes sebesar 10 persen dan kontribusi masyarakat sebesar 20 persen

D. Tingkat Desa

Dana Pemerintah Desa bersumber dari APBDesa dianggarkan setiap tahunnya adalah untuk kegiatan fisik dan/atau non-fisik. Dana APBDes minimal sebesar 10 persen dari nilai RKM untuk kegiatan fisik yang sifatnya pengembangan atau tambahan cakupan pelayanan untuk Desa Baru, Desa Peningkatan dan Desa Perluasan; Alokasi APBDesa untuk PAMSIMAS

merupakan bentuk komitmen dari pemerintah desa dalam melayani warganya di bidang air minum dan sanitasi.

E. Kontribusi Masyarakat

Kontribusi masyarakat untuk pengembangan desa regular, minimal sebesar 20 persen dari total RKM, dalam bentuk tunai (*in-cash*) minimal 4 persen dan tenaga kerja/material (*in-kind*) minimal 16 persen, yang merupakan dana pendukung bagi pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dituangkan di dalam RKM. Kontribusi masyarakat sedapat mungkin menjangkau seluruh warga desa dengan tujuan pelayanan air minum dan sanitasi menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dan membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat desa serta bukan hanya tanggung jawab warga di wilayah yang terlayani saja (*dusun*).

Kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk memiliki dan bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Dengan demikian dana bantuan PAMSIMAS pada hakekatnya merupakan stimulan dan penghargaan atas tumbuhnya kepedulian, prakarsa, inisiatif dan rasa memiliki dan bertanggungjawab.

2.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian sebagai berikut :

Tabel II. 2 Variabel Penelitian

No	Literatur	Sumber	Teori	Variabel	Indikator
1	Partisipasi Masyarakat	(Djaya Mulya, Mouled Moelyono dkk,2019)	Partisipasi adalah adalah melibatkan seseorang atau beberapa orang dalam suku kegiatan, keterlibatan dapat berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala segala kemampuan yang dimiliki	Perencanaan	Mengikuti rapat pembahasan Program PAMSIMAS
					Turut menyumbang ide dalam Program PAMSIMAS
					Berperan dalam menentukan lokasi kegiatan Program PAMSIMAS
					Memberikan masukan dalam Program PAMSIMAS
				Pelaksanaan	Memberi usul dalam tatacara pelaksanaan Program PAMSIMAS
					Terlibat dalam pembangunan fisik Program PAMSIMAS
					Terlibat dalam menyumbang material Program PAMSIMAS
				Pemanfaatan Hasil	Kontribusi tenaga dalam pengaturan dan penggunaan pelayanan

No	Literatur	Sumber	Teori	Variabel	Indikator
2	Indikator Keberhasilan Program PAMSIMAS	(Buku Pedoman Umum PAMSIMAS, 2015).	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban.		Berkontribusi berupa tenaga dalam pemeliharaan
					Berkontribusi berupa uang dalam pemeliharaan
				Peningkatan Akses	Meningkatnya > 50% masyarakat yang dapat mengakses air bersih
					Meningkatnya > 50% masyarakat yang dapat mengakses sanitasi layak
					Kualitas air yang diterima memenuhi standar 3B
					Kuantitas air yang diterima memenuhi kebutuhan masyarakat
				Pemberdayaan Masyarakat	Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS
					Terdapat pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat
				Pengembangan Kelembagaan Lokal	Kinerja Badan Pengelola

No	Literatur	Sumber	Teori	Variabel	Indikator
					Transparansi kepengolaan
				Perilaku Hidup PpSehat	100% kelompok masyarakat berhenti buang air besar sembarangan
					80% masyarakat menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu kritis
					95% sekolah sasaran mempunyai sarana sanitasi yang layak
				Sarana umum	Bantuan Air bersih dan Sanitasi terhadap Fasilitas Umum
				Kepuasan	Kepuasan Masyarakat
					Minim Kendala
					keterjangkauan iuan

Sumber ; Hasil sintesa 2020